

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste adalah hal yang menarik untuk diteliti mengingat pemerintah Indonesia di tahun 1960-an tidak memiliki perhatian khusus terkait konflik di Timor Timur, terlebih karena pada masa itu Indonesia memiliki masalah yang lebih penting seperti Pembebasan Irian Barat dan Operasi Ganyang Malaysia. Terlebih, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki minat untuk memasukkan wilayah non-bekas jajahan Hindia Belanda ke dalam wilayahnya, termasuk wilayah Timor yang memang merupakan wilayah bekas jajahan Portugis. Perhatian ke masalah Timor baru muncul pada masa Orde Baru, yaitu dalam rentang tahun 1974 - 1975. Pemerintahan Soeharto menyadari adanya bahaya yang akan ditimbulkan oleh pengaruh Fretilin yang bersayap kiri. Selain itu, pembentukan negara yang berhaluan komunis di tengah-tengah wilayah Indonesia dikhawatirkan menimbulkan gerakan-gerakan separatis baru (Southgate, 2019). Sebab lainnya adalah ucapan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, terkait ancaman yang mungkin timbul jika Timor Portugis menjadi negara merdeka. Cara yang paling aman bagi Indonesia (dan juga untuk menekan pengaruh komunis di kawasan sekitar Indonesia) adalah dengan mengintegrasikan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia (Simpson, 2005).

Ketika pemilu di Timor Portugis diadakan pada 13 Maret 1975, Fretilin dan UDT menjadi dua partai terbesar saat itu. Fretilin menginginkan sebuah negara merdeka penuh yang berhaluan komunis, sedangkan UDT menginginkan Timor untuk berkembang di bawah pemerintahan Portugis sampai siap secara mandiri untuk mengurus pemerintahan sendiri. Satu faksi lainnya adalah Apodeti (*Associação Popular Democrática Timorense*) yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Di tanggal 11 Agustus 1975, UDT melancarkan kudeta demi menekan pengaruh Fretilin, menyebabkan Gubernur Mario Lemos melarikan diri dari Dili. Kudeta ini dipandang sebagai perang saudara di mata Indonesia, yang ternyata hanya membuat situasi semakin kacau. Pada 28 November 1975, Fretilin

memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste, dan meskipun tidak diakui oleh Indonesia, Australia, dan Portugal, negara ini diakui oleh negara-negara berhaluan kiri seperti Albania, Guinea, Guinea-Bissau, dan Mozambik. Sebagai tanggapan, Indonesia dengan UDT, Apodeti, dan faksi pro-integrasi merancang Deklarasi Balibo di Bali, bukan di Timor Portugis. Tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi militer yang dinamai Operasi Seroja. Operasi sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat, Australia, UDT, dan Apodeti. Mulai dari titik ini sampai tahun 1998, serangkaian pembantaian massal dilakukan dalam mengintegrasikan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia

Operasi Seroja di tahun 1975 sudah memakan korban yang cukup banyak, yaitu 35 korban tewas dari pihak Indonesia dan 122 korban tewas dari FALINTIL (sayap militer Fretilin). Indonesia berhasil menguasai kota Baucau dan mengirimkan sekitar 10.000 - 15.000 tentara di tanggal 25 Desember. Bulan April 1976, Indonesia memiliki 35.000 tentara di Timor Timur, dan lebih banyak lagi di akhir tahun 1976 (dengan tambahan kira-kira 20.000 tentara). Jumlah yang tidak seimbang antara pasukan Indonesia dengan sayap militer Fretilin memaksa Fretilin untuk mundur ke daerah pegunungan dan melakukan perlawanan secara gerilya.

Operasi Seroja membawa dampak nyata secara langsung, cepat, dan masif. Korban jiwa yang berjatuhan sampai bulan Februari 1976 mencapai 60.000 orang di pihak Timor Timur, sebagaimana yang diklaim oleh Lopez da Cruz, seorang Timor yang pro-integrasi (July, 2004). Ironisnya, hampir semua dari korban jiwa tersebut adalah warga sipil. Di bulan November 1976, ada sekitar 100.000 – 200.000 korban jiwa yang jatuh di pihak Timor Timur (Robinson, 2011). Dibandingkan dengan sayap militer Fretilin yang hanya berjumlah 20.000 orang, dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari korban jiwa yang jatuh adalah warga sipil. Antara tahun 1975 sampai 1980, jumlah penduduk di Timor Leste berkisar 700.000 orang dan dalam rentang waktu tersebut, sekitar 100.000 orang menjadi korban dalam konflik bersenjata antara militer Indonesia dengan Fretilin, serta 100.000 orang lagi diperkirakan merenggang nyawa dalam rentang tahun 1980 sampai 1984 akibat kelaparan dan wabah penyakit (Ndiaye, 1994).

Pihak Indonesia juga dilaporkan menggunakan bom napalm yang menyebabkan kerusakan lahan secara masif (Southgate, 2019). Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross/ICRC*) juga dilarang untuk memasuki wilayah Timor Timur pada saat terjadinya konflik sampai larangan tersebut dicabut pada tanggal 19 Oktober 1979. Namun, izin tersebut dicabut kembali oleh pemerintah Indonesia dan ICRC baru dibolehkan kembali ke Timor Timur pada tahun 1983. Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Adam Malik, menyebut jika angka kematian di Timor Timur mencapai 50.000 atau 80.000 jiwa. Pada tanggal 12 November 1979, Mochtar Kusumaatmadja yang menggantikan Adam Malik sebagai Menteri Luar Negeri menyebut jika jumlah korban yang jatuh dalam konflik di Timor Timur mencapai 120.000 jiwa (July, 2004).

Mulai tahun 1979, banyak operasi militer yang dilancarkan oleh pihak militer Indonesia. Sementara Indonesia mengerahkan militer dengan persenjataan lengkap, kelompok FALINTIL melakukan perlawanan secara gerilya. Pihak Indonesia beberapa kali mengklaim bahwa FALINTIL telah kalah, namun Indonesia tetap menyiagakan sampai 35.000 tentara di Timor Timur. Beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan antara lain adalah merekrut anak-anak secara massal untuk dijadikan tameng hidup dalam menghadapi FALINTIL (mulai Agustus 1981), berbagai pengeboman udara mulai 1983 sampai 1984, dan berbagai serangan lainnya mulai tahun 1986 sampai 1988. Pihak Indonesia dan Timor Timur sebenarnya sudah pernah mencapai gencatan senjata pada Maret 1983 antara Kolonel Purwanto dan Komandan Timor Xanana Gusmao, namun dirusak oleh pihak Indonesia pada bulan Agustus 1983.

Selain kasus di atas, Indonesia juga melakukan beberapa kejahatan lain seperti pembunuhan sipil yang termasuk dalam kejahatan perang. Di bulan September 1981, Indonesia membunuh sekitar 500 orang di Gereja St. Antonio di Laciuta dan 200-300 orang di desa Viqueque di tahun 1983. Di antara kasus-kasus tersebut, barangkali peristiwa tahun 1991 adalah peristiwa yang paling diingat baik itu oleh kedua belah pihak. Tanggal 12 November, sekitar 3000 sampai 4000 orang berkumpul di Gereja Motael untuk pawai memperingati kematian Sebastiao Gomes, seorang mahasiswa yang dibunuh di gereja tersebut oleh polisi tiga minggu



sebelumnya (28 Oktober 1991). Massa kemudian melakukan *long march* berkeliling kota sampai tiba di Pemakaman Santa Cruz. Di pemakaman ini, massa berdemonstrasi dengan damai sampai tiba-tiba ditembaki oleh militer Indonesia yang menyamar dengan pakaian sipil. Peristiwa ini disaksikan oleh dua jurnalis asal Amerika Serikat, Amy Goodman dan Allan Nair, serta direkam oleh Max Stahl, yang kemudian ditayangkan oleh *Yorkshire Television*. Peristiwa ini pertama kali ditayangkan di televisi pada bulan Januari 1992 dalam acara dokumenter *First Tuesday In Cold Blood : The Massacre of East Timor* oleh stasiun televisi ITV di Inggris. Berdasarkan laporan dari pemerintah Indonesia, korban tewas dari insiden tersebut hanya sekitar 55 orang dan 66 orang lainnya dinyatakan hilang. Namun, berdasarkan laporan dari PBB, jumlah korban tewas dari peristiwa tersebut berkisar antara 150 sampai 270 orang dengan dugaan banyak dari mereka yang dikubur secara massal dan tanpa nama. Laporan yang sama juga menyebut jika korban yang hilang berjumlah sekitar 224 orang (Ndiaye, 1994).

Pihak Indonesia segera menanggapi peristiwa itu dengan menyatakan hal tersebut sebagai insiden yang diakibatkan oleh kesalahpahaman antara demonstran dengan militer yang disebabkan karena provokasi dari para demonstran, sedangkan PBB menyebut jika peristiwa tersebut lebih cocok disebut sebagai “pembunuhan” dibandingkan “insiden”. Pihak PBB juga mengatakan jika peristiwa di Santa Cruz wajar bila disebut sebagai “pembantaian” (Ndiaye, 1994). Laporan mengenai peristiwa ini tersebar di seluruh dunia, membuat malu pemerintah Indonesia yang diikuti dengan gelombang protes dan kecaman dari berbagai pihak. Posisi Indonesia jadi semakin sulit setelah Pdt. Carlos Filipe Ximenes Belo dan Jose Ramos Horta mendapat hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1996 atas usaha mereka untuk “mencari solusi terbaik bagi penyelesaian konflik di Timor Timur”.

Eskalasi militer di Timor Timur mulai mereda di tahun 1997 karena Indonesia dilanda krisis ekonomi yang parah sebagai dampak dari krisis ekonomi Asia Tenggara. Di tahun 1998, meski Orde Baru tidak pernah memberikan opsi kemerdekaan bagi Timor Timur, perbincangan mengenai kemerdekaan untuk wilayah itu terus mencuat di sepanjang tahun 1998. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengusulkan adanya pembentukan otonomi khusus

bagi Timor Timur, sedangkan Presiden Habibie, pada tanggal 8 Juni 1998, mengumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan opsi otonomi khusus bagi Timor Timur. Di akhir tahun 1998, PM Australia John Howard mengusulkan agar Indonesia memberikan referendum selama satu dekade terhadap Timor Timur, yang kemudian ditanggapi oleh Presiden Habibie bahwa Indonesia telah melakukan “upaya kolonialisme” jika opsi tersebut diberikan. Pada akhirnya, Presiden Habibie memilih untuk melakukan referendum dalam tempo yang secepatnya terhadap Timor Timur (Thaler, 2012).

Pada tanggal 5 Mei 1999, Indonesia bersama dengan Portugal mengumumkan bahwa mereka setuju untuk melakukan pemungutan suara yang memungkinkan masyarakat Timor Timur untuk merdeka. Meski begitu, banyak kekerasan yang menyasar kelompok pro-kemerdekaan yang dilakukan oleh kelompok pro-integrasi, salah satunya adalah penyerangan terhadap desa Aitara oleh sekelompok orang yang didampingi oleh tentara Indonesia dan penyerangan terhadap kantor UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) di Maliana. Meski pemerintah Indonesia bersikeras bahwa mereka tidak bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Timor Timur, Ramos Horta mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Indonesia adalah menimbulkan kekacauan besar dan ketidakstabilan di Timor Timur sebelum mereka angkat kaki dari sana.

Pemungutan suara akan dilakukan tanggal 8 Agustus 1999, yang kemudian diundur ke tanggal 30 Agustus, dan dilakukan oleh UNAMET. Indonesia juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses pemungutan suara, dan meskipun hal ini dikhawatirkan banyak pihak, PBB yakin bahwa Indonesia tidak akan mengizinkan adanya pengamanan apapun kecuali jika itu dilakukan oleh pihak Indonesia. Sebelum hari dilaksanakannya pemungutan suara, pihak-pihak Indonesia, salah satunya Lopez da Cruz, mengancam bahwa akan terjadi “pertumpahan darah” jika mayoritas Timor Timur menolak otonomi. Ancaman kepada masyarakat Timor Timur terus berlanjut dan menjadi semakin banyak menjelang hari pemungutan suara. Pada akhirnya, ketika pemungutan suara dilakukan tanggal 30 Agustus 1999, suasana berlangsung secara tenang dan tertib. Sekitar 98% pemilih yang terdaftar menggunakan haknya dan tanggal 4 September

1999, Sekjen PBB Kofi Annan mengumumkan bahwa 75,6% masyarakat Timor Timur memilih kemerdekaan dibandingkan integrasi.

Beberapa jam setelah pengumuman hasil referendum, terjadi kerusuhan di Dili. Hal tersebut menyebabkan banyak jurnalis dan pengamat internasional melarikan diri dari kota itu, serta menyebabkan sebagian besar warga Timor Timur untuk melarikan diri ke pegunungan. Sekitar 24 orang tewas di hari itu di dalam gereja yang dibakar oleh sekelompok orang, dan keesokan harinya kantor ICRC dibakar sampai rata dengan tanah. Sekitar seribu orang lainnya tewas dibunuh di Suai, dan berbagai pembantaian juga terjadi di tempat lain. PBB menarik hampir semua personilnya dari Dili, menyisakan empat orang relawan yang menolak untuk dievakuasi kecuali jika diizinkan untuk membawa pengungsi bersama dengan mereka. Indonesia dan sayap militernya juga memaksa 200.000 orang untuk pindah ke Timor Barat, ke sebuah kamp yang menurut Pengamat HAM Internasional dideskripsikan sebagai kamp yang menyedihkan. Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, pemerintah Indonesia mengelak, bahkan Presiden Habibie mengatakan kepada delegasi PBB (yang datang pada tanggal 8 September 1999) bahwa pembantaian tersebut hanyalah sebuah kebohongan.

Serangkaian aksi pembantaian membuat marah berbagai pihak, khususnya Amerika Serikat dan Australia. Australia melalui Perdana Menteri John Howard melobi Sekjen PBB Kofi Annan dan Presiden AS Bill Clinton agar diizinkan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Timor Timur. Pada tanggal 11 September, izin diberikan dan Presiden Habibie mulai menarik pasukan Indonesia dari Timor Timur per tanggal 12 September. Lebih lanjut, PBB melalui Resolusi 1264 mengirim pasukan perdamaian internasional untuk menjaga keamanan di Timor Timur, juga untuk mengawasi transisi kemerdekaan Timor Timur. Pasukan Internasional Timor Timur (*International Force East Timor/INTERFET*) masuk ke Dili pada tanggal 20 September 1999 dan pasukan Indonesia yang terakhir ditarik pada tanggal 31 Oktober 1999. Sempat ada pertikaian antara INTERFET dengan paramiliter pro-integrasi, namun keadaan berhasil diamankan kembali.

PBB kemudian mendirikan Administrasi Sementara PBB di Timor Timur (*United Nations Transitional Administration in East Timor/UNTAET*) pada akhir



bulan Oktober 1999 dan mengambil alih administrasi wilayah tersebut selama dua tahun. Setelah itu, kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan Timor Leste yang sah dan kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 20 Mei 2002 dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. Tanggal 27 September 2002, Timor Leste diterima sebagai anggota PBB ke-191.

Konflik ini meninggalkan banyak korban untuk kedua belah pihak. Selama periode konflik (Desember 1975 – Oktober 1999), sekitar 3400 tentara Indonesia tewas dan 2400 mengalami luka berat hingga cacat fisik, sedangkan 100.000 sampai 200.000 warga Timor menjadi korban dari konflik ini. Untuk merehabilitasi para prajurit yang mengalami luka hingga cacat fisik, pada tahun 1977 pemerintah Indonesia mendirikan wisma rehabilitasi di kawasan Bekasi yang bernama Wisma Seroja. Awalnya ada 425 veteran Operasi Seroja yang menempati wisma ini dan sampai bulan November 2014 tersisa 223 veteran. Jasa para veteran ini diperingati setiap tanggal 19 Mei sebagai Hari Korps Cacat Veteran Republik Indonesia.

## **B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH**

### **1. PEMBATASAN MASALAH**

- a. Penelitian ini dibatasi pada sejarah dan latar belakang terjadinya Operasi Seroja di tahun 1975 sampai menjadi sebuah wilayah yang merdeka di tahun 2002

### **2. PERUMUSAN MASALAH**

- a. Apa yang menyebabkan konflik di akhir masa kolonialisme Timor Portugis?
- b. Apa yang melatarbelakangi terjadinya Operasi Seroja baik itu dari segi keamanan nasional dan dinamika geopolitik luar negeri?
- c. Bagaimana proses referendum Timor Timur menjadi negara merdeka Timor Leste?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN**

### **A. TUJUAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejarah Indonesia di Timor Timor baik itu dari sudut pandang Indonesia, Timor Leste, dan dunia internasional. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai satu usaha kebaruan dalam penulisan sejarah Indonesia dengan mengangkat peristiwa-peristiwa yang jarang diangkat ke permukaan.

### **B. KEGUNAAN**

- Kegunaan Teoritis : Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah agar bertambahnya referensi yang membahas tentang sejarah Indonesia
- Kegunaan Praktis : Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan pengayaan dan pembelajaran dalam Prodi Pendidikan Sejarah, khususnya yang membahas tentang Sejarah Indonesia.

## **D. METODE DAN BAHAN SUMBER**

### **A. METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah historis dengan dengan teknik studi kepustakaan. Langkah-langkah yang pengumpulan data adalah melakukan analisis jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari sumber-sumber yang didapat yang kemudian disusun menjadi narasi secara akurat. Dalam metode ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah identifikasi sumber-sumber yang relevan, evaluasi keandalan, keakuratan, dan keaslian sumber, mengolah informasi dari sumber, menginterpretasi isi sumber, dan diakhiri dengan penyusunan tulisan artikel historis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik itu secara fisik atau yang tersedia secara daring seperti buku, majalah, dan artikel ilmiah.



## B. BAHAN SUMBER

Bahan sumber yang penulis gunakan adalah sumber primer berupa laporan-laporan dari lembaga internasional dari PBB dan CAVR mengenai data-data pelanggaran HAM di baik itu yang dilakukan oleh pihak Indonesia maupun pihak Timor Timur (Fretilin, Falintil, UDT, dan APODETI) serta wawancara dengan veteran pejuang Operasi Seroja. Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan antara lain adalah artikel, jurnal, buku sejarah, skripsi dan tesis yang membahas tentang sejarah Indonesia di Timor Timur yang mendukung topik penelitian penulis.

